

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021. LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Praya, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MUHAMMAD

NIP. 19651231 1989 03 1 209

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

RINGKASAN EKSEKUTIF..... 4

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Tugas Pokok dan Fungsi 6

I.2. Data Kepegawaian..... 6

I.3. Struktur Organisasi SKPD..... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis SKPD..... 9

II.2. Rencana Kinerja Tahunan 10

II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 13

II.4. Perjanjian Kinerja SKPD tahun 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2021..... 13

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2021..... 13

III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD
Tahun 2021..... 15

III.4. Akuntabilitas Keuangan..... 17

BAB IV PENUTUP 21

LAMPIRAN :

DAFTAR LAMPIRAN 22

1. RENSTRA

2. CASCADING KINERJA

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

6. DAFTAR PRESTASI/PIAGAM PENGHARGAAN YANG
DIPEROLEH OPD TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian penjabaran lebih lanjut dikeluarkannya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi, kerjasama, pengendalian, pengawasan izin investasi , informasi dan data serta Pelayanan Perizinan terpadu.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mendorong serta turut mempercepat kemajuan daerah yang meliputi berbagai bidang yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai cermin kemajuan daerah dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dibutuhkan berbagai strategi yang mampu mendorong semangat kewirausahaan masyarakat serta investor untuk melakukan investasi di daerah, seperti kemudahan untuk mendapatkan izin serta dengan biaya yang murah untuk melakukan berbagai usaha dan investasi.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, yang kesejahteraannya menjadi salah satu tujuan pembangunan perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan dukungan termasuk didalamnya mempermudah pemberian izin usaha serta izin lainnya bagi masyarakat (pengusaha /industri kecil).

c. Penciptaan Lapangan Usaha dan Kerja

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk menerbitkan berbagai bentuk izin dengan sistem cepat, murah dan legal akan dapat membantu tumbuhnya berbagai usaha masyarakat yang bermuara pada pembukaan lapangan kerja yang akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yang selama ini menjadi salah satu masalah daerah.

d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tumbuhnya berbagai usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat baik yang berskala mikro maupun makro yang menyerap tenaga kerja, langsung maupun tak langsung akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Mendorong Iklim Persaingan Berusaha yang Positif dan Produktif.

Perizinan adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui oleh pengusaha /investor untuk melindungi dirinya dari berbagai aspek hukum berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga dapat melaksanakan usahanya dengan aman .Keadaan itu akan mendukung iklim usaha yang baik menuju produktifitas yang tinggi.

Untuk dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan di atas yang diamanatkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah tersebut diatas telah ditindak lajuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 45 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 Tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan, kemauan serta komitmen dari semua pihak untuk mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berfungsi dengan baik, sehingga pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan memuaskan, sesuai Visi, Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I.1.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I.1.2.Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai berdasarkan Data Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 33 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

| No. | Nama | L/P | Gol. | Ecelon | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Diklat PIM yang telah diikuti | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Drs. H. Muhamad | L | IV/c | II/b | Kepala Dinas | S1 /Manajemen | ADUM | |
| 2. | Drs. Helmi Qazwaini | L | IV/b | III/a | Sekretaris | S1 / Ilmu Pemerintahan | | |
| 3. | BQ. Enny Mardiana.W, SH.,MH | P | IV/a | III/b | Kabid Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal | S2/ Hukum | ADUM | |
| 4. | M. Sofyan Zarosihan, S.STP.,MH | L | IV/a | III/b | Kabid Pengembangan Iklim investasi dan Promosi Penanaman Modal | S2/ Hukum | | |
| 5. | L. Moh. Aminolah, S.IP | L | III/d | IV/a | Kasubag Umum dan Kepegawaian | S1/Ilmu Pemerintahan | Diklat Pim IV | |
| 6. | Citra Wahyuningtyas, SE | P | III/c | IV/a | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | S1/ Ekonomi | - | |
| 7. | Mimin Setyani, S.Sos | P | III/d | IV/a | Kasi Pengembangan Iklim Investasi | S1 Sosial | - | |
| 8. | Lalu Munardi, S.Kom | L | III/d | IV/a | Kasi Promosi Penanaman Modal | S1 Komputer | - | |
| 9. | Lumayan | L | III/c | IV/a | Kasi Informasi Penanaman Modal | SMA | - | |
| 10. | Lalu Agus Mahyudi, ST | L | III/d | IV/a | Kasi Pelayanan Perizinan | S1 Teknik | - | |
| 11. | H.L Nur Hidayat Suharta, SH.,M.Si | L | III/c | IV/a | Kasi Pelayanan Non Perizinan | S2 Sains | - | |
| 12. | Maruli | L | III/d | IV/a | Kasi Data | SMA | Diklat Pim IV | |
| 13. | H. Sahrip, SH | L | III/d | IV/a | Kasi Pengaduan | S1 Hukum | Diklat Pim IV | |
| 14. | Hj. Sahanum, SE | P | III/d | IV/a | Kasi Pengendalian | S1 Ekonomi | - | |
| 15. | Suadi | L | III/b | - | Staf Administrasi Pelayanan | STMN | - | |
| 16. | Ahmad Hanapi, S.IP | L | III/c | - | Staf bidang Pengendalian dan Pengaduan | SI/Ilmu Pemerintahan | - | |
| 17. | Philia Krismarini, S.KM | P | III/c | - | Pengelola Izin SIUP, TDP. | S1 Kesehatan Masyarakat | - | |
| 18. | Lalu Kharismawan Mauddudy, S.Kom | L | III/c | - | Frontliner/Customer Service | S1 Teknik Informatika | - | |
| 19. | Erna Yulianti, A.Md | P | III/b | - | Pengelola Izin Tempat Usaha | D3 Perpajakan | - | |
| 20. | Lale Halimatssakdiyah | P | III/b | - | Pengelola izin Gangguan | SMA (IPA) | - | |
| 21. | Ratnaningsih | P | II/d | - | Bendahara Gaji | SMA | - | |
| 22. | Lalu Eko Prasetyo | L | II/d | - | Operator Komputer | SMA (Bahasa) | - | |
| 23. | Baiq Desi Kertha Sari | P | II/d | - | Pengadministrasi Umum | SMA | - | |
| 24. | Baiq Sri Handayani | P | II/d | - | Pengadministrasi Umum | SMA | - | |
| 25. | Lalu Nushak Ali | L | II/d | - | Pengelola Izin Tempat Usaha | SMA | - | |
| 26. | Baiq Yeti Herawati | P | II/d | - | Pengadministrasi Umum | SMA (IPS) | - | |
| 27. | Irfan Halomoan | L | II/c | - | Bendahara Pengeluaran | SMA | - | |
| 28. | Fatma Mandalika Saputri | P | III/a | - | Pengolah Data Kepegawaian | SMA | - | |
| 29. | Hariowiyatno | P | II/d | | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | SMA | - | |
| 30. | Putu Dharma Yanto Saputra, SE | L | CPNS | - | Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan | SI/Manajemen | - | |
| 31. | Luh Putu Dyah Madyawati, SE | P | CPNS | - | Analisis Peraturan Investasi | SI/Manajemen | - | |
| 32. | Losfalozi, A.Md | L | CPNS | - | Staf Bid. Pengendalian dan Pengaduan | D3 Perpajakan | - | |
| 33. | Rima Suci Wulandari, | P | CPNS | - | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | S1/Desain | - | |

Berikut ditampilkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

```
graph TD; KD[KEPALA DINAS  
Drs. H. MUHAMAD] --> SJF[Kelompok Jabatan Fungsional]; KD --> SEK[SEKRETARIS  
Drs. Helmi Qazwaini]; KD --> SBUK[Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
L. MOH. AMINOLAH, S. IP]; KD --> SBPK[Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
CITRA WAHYUNINGTYAS, SE]; KD --> BPIM[Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal  
M. SOFYAN ZAROZHAN, S.STP., MH]; KD --> BPTSP[Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
-]; KD --> BPP[Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Hj. BQ. ENNY MARDIANA W., SH., MM]; BPIM --> SPI[Seksi Pengembangan Iklim Investasi  
MIMIN SETYANI, S. Sos]; BPIM --> SPM[Seksi Promosi Penanaman Modal  
LALU MUNARDI, S. Kom]; BPIM --> SIPM[Seksi Informasi Penanaman Modal  
LUMAYAN]; BPTSP --> SPL[Seksi Pelayanan Perizinan  
LALU AGUS MAHYUDI, ST]; BPTSP --> SPNP[Seksi Pelayanan Non Perizinan  
H.L. NUR HIDAYAT SUHARTA, S.Sos., MH]; BPTSP --> SD[Seksi Data  
MARULI]; BPP --> SP[Seksi Pengendalian  
Hj. SAHANUM, SE]; BPP --> PGP[Seksi Pengaduan  
H. SAHRIP, SH]; BPP --> SEP[Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal];
```

The organizational chart for PT. KAWA BANGSA RAYA is structured as follows:

- KEPALA DINAS**
Drs. H. MUHAMAD
 - Kelompok Jabatan Fungsional (Functional Job Group) - Represented by a yellow grid.
 - SEKRETARIS**
Drs. Helmi Qazwaini
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
L. MOH. AMINOLAH, S. IP
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
CITRA WAHYUNINGTYAS, SE
 - Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal**
M. SOFYAN ZAROZHAN, S.STP., MH
 - Seksi Pengembangan Iklim Investasi
MIMIN SETYANI, S. Sos
 - Seksi Promosi Penanaman Modal
LALU MUNARDI, S. Kom
 - Seksi Informasi Penanaman Modal
LUMAYAN
 - Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
-
 - Seksi Pelayanan Perizinan
LALU AGUS MAHYUDI, ST
 - Seksi Pelayanan Non Perizinan
H.L. NUR HIDAYAT SUHARTA, S.Sos., MH
 - Seksi Data
MARULI
 - Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal**
Hj. BQ. ENNY MARDIANA W., SH., MM
 - Seksi Pengendalian
Hj. SAHANUM, SE
 - Seksi Pengaduan
H. SAHRIP, SH
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA) dengan Misi :

- 1. Merawat Ahlaqul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat,
- 2. Mencapai Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Mandiri dan Unggul,
- 3. Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih,
- 4. Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas,
- 5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab untuk mencapai misi 3 (Tiga), yaitu : Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih. dan Misi 4 (Empat) yaitu : Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas

Untuk mencapai misi tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki rencana strategis sebagai berikut :

| RENCANA STRATEGIS | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------|
| TAHUN 2021 S.D 2026 | | | | | |
| | | | | | |
| INSTANSI : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | |
| TUJUAN | Sasaran | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Keterangan |
| | Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatkan kualitas pelayanan investasi daerah | | Indeks Pelayanan Publik | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen, Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi | Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan | | Program Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (poin) | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| Peningkatan Investasi | | Laju pertumbuhan investasi (%) | Meningkatkan laju dan realisasi investasi di kabupaten lombok tengah dengan menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pemetaan potensi investasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| | Menciptakan iklim investasi favorabel | Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.) | | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT Merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

| RENCANA KINERJA TAHUNAN | | |
|--|--|-----------------------|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | |
| | | |
| SKPD | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| Tahun | : 2021 | |
| | | |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| Meningkatkan kualitas pelayanan investasi daerah | Indeks Pelayanan Publik | C |
| Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi | Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan | 3% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (poin) | Baik (75,00) |
| Peningkatan Investasi | Laju pertumbuhan investasi (%) | 0.11 % |
| Menciptakan iklim investasi favorabel | Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.) | Rp. 1.873.792.000.000 |

II. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

Dalam rangka pengukuran dan peningkaratan kinerja serta lebih meningkarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | |
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | KONDISI SAAT INI (2021) | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- | | | | | KONDISI AKHIR |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan investasi | Indeks Pelayanan Publik | Hasil Penilaian dari Kemenpan RB | https://sipgn.menpan.go.id/ | DPMPPTSP | C- | C | B- | B- | B | B | B |
| 2 | Meningkatkan kapasitas layanan perijinan | Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan | (Nilai tahun N - Nilai Tahun N-1)/Nilai Tahun N-1 | OSS-RBA | DPMPPTSP | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (point) | Survey Kepuasan Pelanggan (https://dpmpptsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik) : Tidak Baik =25,00-64,99 Kurang Baik=65,00-76,60 Baik=76,61-88,3 Sangat Baik=88,31-100 | OSS-RBA | DPMPPTSP | 75.43 poin | baik (75,00) | baik (77,00) | baik (78,00) | baik (79,00) | baik (80,00) | baik (80,00) |
| 3 | Peningkatan investasi | Laju pertumbuhan investasi (%) | (Nilai tahun N - Nilai Tahun N-1)/Nilai Tahun N-1 | https://nswi.bkpm.go.id/tableau/fo | DPMPPTSP | 318% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 4 | Menciptakan iklim investasi favorabel | Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.) | - | https://nswi.bkpm.go.id/tableau/fo | DPMPPTSP | 2.200.754.000.000 | 1.875.876.000.000 | 1.877.971.000.000 | 1.880.053.000.000 | 1.882.146.000.000 | 1.884.241.000.000 | 1.884.241.000.000 |

II.4 Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021

Berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 ditetapkan bahwa Kepala OPD wajib membuat perjanjian kinerja paling lambat satu bulan setelah DPA ditetapkan.

Perjanjian kinerja Kepala OPD dijabarkan secara lebih operasional ke dalam Perjanjian Kinerja Pejabat eselon III, IV dan staf. Berikut kami sampaikan ringkasan Perjanjian Kinerja DPMPTSP tahun 2021 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMAD

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Pathul Bahri, S.IP

Jabatan : Bupati Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 22 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Lalu Pathul Bahri, S.IP

Drs. H. MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| No. | Indikator | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Investasi Daerah | Indeks Pelayanan Publik | C |
| 2. | Meningkatkan Kapasitas Layanan Perijinan Investasi | Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan | 3% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik (75,00) |
| 3. | Peningkatan Investasi | Laju Pertumbuhan Investasi | 0,11 % |
| 4. | Menciptakan Iklim Investasi Favorabel | Nilai Investasi PMDN dan PMA | Rp. 1.873.792.000.000 |

| Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|--|---------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | 4.485.714.024 | APBD |
| 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 202.962.164 | APBD |
| 3. Program Promosi Penanaman Modal | 129.117.555 | APBD |
| 4. Program Pelayanan Penanaman Modal | 129.186.687 | APBD |
| 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 392.223.366 | APBD |
| 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 44.048.728 | APBD |

Praya, 22 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Lalu Pathul Bahri, S.IP

Pihak Pertama,



Drs. H. MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

| No. | Capaian Kinerja | Keterangan |
|-----|-------------------|---------------|
| 1. | Nilai > 100 | SANGAT BAIK |
| 2. | Nilai 86 s/d 100 | BAIK |
| 3. | Nilai 71 s/d < 85 | SEDANG |
| 4. | Nilai 56 s/d < 70 | KURANG |
| 5. | Nilai < 55 | SANGAT KURANG |

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

III.2.1. Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi diukur dengan indikator Kinerja sasaran, yaitu : Indeks Pelayanan Publik

III.2.2. Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi diukur dengan indikator Kinerja sasaran, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan

III.2.3. Sasaran 3 : Peningkatan investasi diukur dengan indikator Kinerja sasaran, yaitu : Laju pertumbuhan investasi

III.2.4. Sasaran 4 : Menciptakan iklim investasi favorable diukur dengan indikator Kinerja sasaran, yaitu : Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % | Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2020) | Target Akhir Renstra | Sumber Data |
|-----------|---|----------|-------------------|-------------------|------------|---|----------------------|---|
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | Kategori | C | C- | 83,33% | - | B | https://sippn.menpan.go.id/ |
| 2 | Persentase Peningkatan Volume Pelayanan | % | 3% | 3% | 100,00% | -28% | 3% | OSS-RBA |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | poin | baik (75,00) | 75.43 poin | 100,57% | 77.54 poin | baik (80,00) | OSS-RBA |
| 4 | Laju Pertumbuhan Investasi | % | 0.11% | 318% | 289090,91% | 343% | 0.11 % | https://nswi.bkpm.go.id/ |
| 5 | Nilai Investasi PMDN dan PMA | Rp. | 1.873.792.000.000 | 2.200.754.000.000 | 117,45% | 527.058.000.000 | 1.884.241.000.000 | https://nswi.bkpm.go.id/ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RATA-RATA | | | | | 57898,45% | | Kriteria : Baik | |

- a. Indeks Pelayanan Publik
- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah **indeks** yang digunakan untuk mengukur kinerja **pelayanan publik** di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan **Pelayanan**, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, SIPP, Aspek Konsultasi & Pengaduan, dan Aspek Inovasi
 - Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah melalui Pengisian kuisioner data objektif, survei publik dan observasi (<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-nusa-tenggara-barat/kabupaten-lombok-tengah>).

- 3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik>
- 4. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah program pelayanan penanaman modal dan program pengolahan data dan sistem informasi informasi penanaman modal
- 5. Dokumentasi



- 6. Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 mendapatkan kategori C-, penilaian ini baru dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga belum bisa dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan terhadap kualitas pelayanan perijinan untuk pencapaian IPP pada target akhir renstra dengan kategori B.
 - 7. Hambatan pencapaian target indikator pada tahun 2021 adalah pandemi covid 19.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat

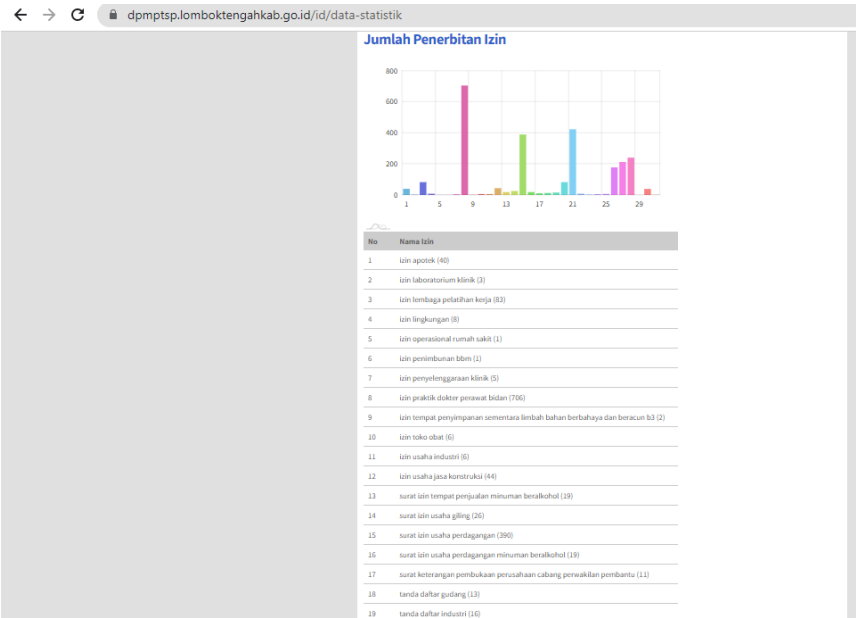
- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
- 2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah melalui Survey Kepuasan Pelanggan (<https://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik>).
- 3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah <https://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik>
- 4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 5. Dokumentasi



- 6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan pada tahun 2021 sebesar 75,43 poin (baik). jika dibandingkan dengan IKM pada tahun 2020 sebesar 77,54 poin maka dapat dilihat terjadi penurunan sebesar 2,11 poin. namun capai IKM pada tahun 2021 masih mendukung dan menunjang untuk pencapaian IKM pada target akhir renstra sebesar 75,00 poin (baik).
- 7. Hambatan pencapaian target indikator pada tahun 2021 adalah pandemi covid 19 dan transisi pengajuan perizinan dari offline menjadi online

c. Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan

- 1. Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan merupakan nilai yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi.
- 2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah melalui perhitungan dengan perhitungan sebagai berikut Volume Pelayanan Perizinan tahun n dikurangi volume tahun n-1 dibagi tahun ke n-1 dikali 100.
- 3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah <https://dpmpmsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik>
- 4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 5. dokumentasi



- 6. Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan pada tahun 2021 sebesar 3% dengan jumlah izin yang telah diterbitkan sebesar 3.249 izin. persentase ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 28% yang disebabkan oleh pandemi covid 19. capaian target indikator telah sesuai dengan capaian target akhir renstra sebesar 3%.

7. Hambatan yang dialami berupa percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin yang belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD teknis (birokrasi perizinan belum satu pintu).

d. Laju Pertumbuhan Investasi

1. Laju pertumbuhan investasi merupakan peningkatan atau penurunan jumlah investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sebagai indikator penentu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah Nilai Investasi tahun ke n dikurangi realisasi tahun ke n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100
3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52
4. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Dokumentasi



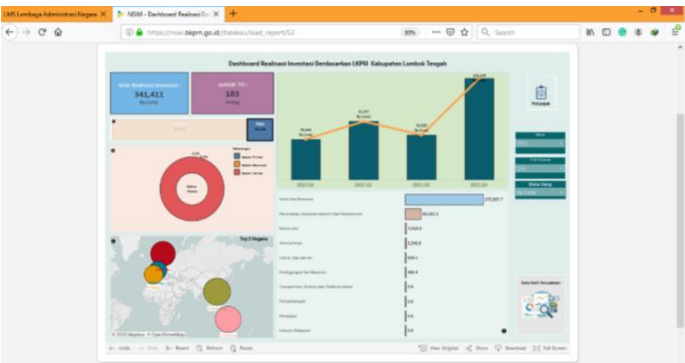
6. Laju pertumbuhan investasi pada tahun 2021 adalah sebesar 318% dengan realisasi investasi baik PMDN dan PMA sebesar Rp. 2.200.754.000.000,-. pada tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar 343% dengan realisasi investasi sebesar Rp. 527.058.000.000,-. capaian target ini lebih tinggi dari target akhir renstra sebesar 0,11 %.
7. Hal hal yang meningkatkan laju pertumbuhan investasi di wilayah kabupaten lombok tengah adalah telah dilaksanakannya berbagai event internasional seperti WSBK dan Moto GP.

e. Nilai Investasi PMDN dan PMA

1. Nilai Investasi PMDN dan PMA merupakan total realisasi penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah rekap penanaman modal yang tersedia pada https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52
3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52
4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten/kota, pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota, penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

5. Dokumentasi



- 6. Nilai Investasi PMDN dan PMA pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.200.754.000.000,- , meningkat Rp. 1.673.696.000.000 dibandingkan tahun 2020 dengan nilai investasi PMDN dan PMA sebesar Rp. 527.058.000.000,-. sedangkan target akhir renstra adalah sebesar Rp. 1.884.241.000.000,-
- 7. Peningkatan nilai investasi pada tahun 2021 didukung dengan telah dilaksanakan event WSBK dan akan dilaksanakan event moto GP 2022.

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2021

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021**

| TUJUAN | | RATA - RATA CAPAIAN SASARAN | | KRITERIA CAPAIAN SASARAN | RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN | KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN |
|-----------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan investasi daerah | 1 | Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi | 100,00% | Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan | Indeks Pelayanan Publik |
| | | | | 100,57% | Indeks Kepuasan Masyarakat (point) | |
| 2 | peningkatan investasi | 2 | menciptakan iklim investasi favorabel | 117,45% | Nilai investasi PMDN dan PMA | Laju pertumbuhan investasi |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rata-rata Total | | | 108,72% | Baik | 1445,871195 | Baik |

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Belanja untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sebesar Rp. 5.383.252.524 terdiri dari :

Belanja terdiri dari 6 program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Program pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.485.714.024,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 4.018.652.967,- dan belanja modal sebesar Rp. 467.061.057,-. Program Kedua adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 202.962.164,- yang keseluruhannya merupakan belanja operasi. Program Ketiga adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 129.117.555,- yang keseluruhannya merupakan belanja operasi. Program Keempat adalah Program Pelayanan Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 129.186.687,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 118.611.687,- dan belanja modal sebesar Rp. 10.575.000,-. Program Kelima adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 392.223.366,- yang keseluruhan merupakan belanja operasi dan bersumber dari DAK. Program Keenam adalah Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.048.728,- yang keseluruhan merupakan belanja operasi.

Realisasi keuangan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp . 5.036.662.668 (94 %) dan Realisasi Fisik mencapai 100 %

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021

| NO | Program dan Kegiatan yang dilaksanakan | | Belanja Tidak langsung | Belanja | | Total Belanja | Realisasi Belanja | Persentase | Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan | |
|--|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|---|---------------|
| | | | | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Belanja Modal |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | Rp 3.438.578.106 | Rp 1.467.038.361 | Rp 477.636.057 | Rp 5.383.252.524 | Rp 5.036.662.668 | 94% | |
| A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | Rp 3.438.578.106 | Rp 580.074.861 | Rp 467.061.057 | Rp 4.485.714.024 | Rp 4.246.202.683 | 95% | SEKRETARIAT |
| 1 | Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja | | | | | | | | | |
| | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Rp 17.737.403 | | Rp 17.737.403 | Rp 17.696.779 | 100% | |
| | b | Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Rp 5.903.203 | | Rp 5.903.203 | Rp 5.172.575 | 88% | |
| | c | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 4.541.825 | | Rp 4.541.825 | Rp 4.523.093 | 100% | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Rp 3.438.578.106 | | | Rp 3.438.578.106 | Rp 3.290.395.869 | 96% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Rp 4.148.936 | | Rp 4.148.936 | Rp 4.146.907 | 100% | |
| | b | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | | Rp 23.351.952 | | Rp 23.351.952 | Rp 22.647.746 | 97% | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | a | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Rp 19.874.744 | Rp 96.044.466 | Rp 115.919.210 | Rp 107.059.677 | 92% | |
| | b | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Rp 15.352.628 | Rp 3.898.318 | Rp 19.250.946 | Rp 18.923.020 | 98% | |
| | c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Rp 14.400.000 | | Rp 14.400.000 | Rp 13.905.000 | 97% | |
| | d | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Rp 12.884.000 | | Rp 12.884.000 | Rp 4.248.199 | 33% | |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| | a | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 21.566.374 | 90% | |
| | b | Pengadaan Mebel | | | | Rp 148.344.273 | Rp 148.344.273 | Rp 146.336.000 | 99% | |
| | c | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Rp 19.500.000 | Rp 194.774.000 | Rp 214.274.000 | Rp 213.934.000 | 100% | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| | a | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Rp 236.586.440 | | Rp 236.586.440 | Rp 191.013.782 | 81% | |
| | b | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Rp 45.600.000 | | Rp 45.600.000 | Rp 45.600.000 | 100% | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| | a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Rp 101.603.250 | | Rp 101.603.250 | Rp 92.931.662 | 91% | |
| | b | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Rp 32.330.480 | | Rp 32.330.480 | Rp 32.317.000 | 100% | |
| | c | Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Rp 26.260.000 | | Rp 26.260.000 | Rp 13.785.000 | 52% | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | Rp 202.962.164 | | Rp 202.962.164 | Rp 202.622.336 | 100% | BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL |
| 1 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | | | | | | | | |
| | a | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | Rp 21.355.363 | Rp 21.355.363 | Rp 21.355.035 | 100% | |
| | b | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | Rp 17.376.000 | Rp 17.376.000 | Rp 17.376.000 | 100% | |
| 2 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | a | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp 60.247.509 | Rp 60.247.509 | Rp 60.078.009 | 100% | |
| | b | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | | | Rp 103.983.292 | Rp 103.983.292 | Rp 103.813.292 | 100% | |
| | | | | | | | | | |
| C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | Rp 129.117.555 | | Rp 129.117.555 | Rp 125.650.637 | 97% | |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | | | | | | | | |
| | a | Penyusunan Strategi Penanaman Modal | | | Rp 61.484.880 | Rp 61.484.880 | Rp 61.484.700 | 100% | |
| | b | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah | | | Rp 67.632.675 | Rp 67.632.675 | Rp 64.165.937 | 95% | |
| | | | | | | | | | |
| D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | Rp 118.611.687 | Rp 10.575.000 | Rp 129.186.687 | Rp 102.969.882 | 80% | BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | | | | | | | | |
| | a | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik | | | Rp 118.611.687 | Rp 10.575.000 | Rp 129.186.687 | Rp 102.969.882 | 80% |
| | | | | | | | | | |
| E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | Rp 392.223.366 | | Rp 392.223.366 | Rp 318.447.852 | 81% | BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN |
| 1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | | | | | | | | |
| | a | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | Rp 55.090.248 | Rp 55.090.248 | Rp 47.013.693 | 85% | |
| | b | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | Rp 234.823.049 | Rp 234.823.049 | Rp 180.380.100 | 77% | |
| | c | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | Rp 102.310.069 | Rp 102.310.069 | Rp 91.054.059 | 89% | |
| | | | | | | | | | |
| F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | Rp 44.048.728 | | Rp 44.048.728 | Rp 40.769.278 | 93% | BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah | | | | | | | | |
| | a | Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | Rp 44.048.728 | Rp 44.048.728 | Rp 40.769.278 | 93% | |

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan :

Dari uraian di atas kita dapat memahami tingkat keberhasilan serta kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah lembaga yang mengemban tugas bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan.

Sehingga kedepan diperlukan berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik
- Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan pelayanan perizinan serta penyebaran informasi potensi dan peluang investasi.
- Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.
- Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada unit pelayanan.
- Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian Pengaduan perizinan.
- Melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi.
- Menarik Investor Asing dan Investor Dalam Negeri dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan terutama pada tempat serta alat kerja yang memadai
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait guna mempercepat proses perizinan.

2. Saran Saran

- Pemerintah atau Sekretariat Daerah dapat membantu memfasilitasi OPD yang menjadi inisiator untuk menyusun draf Peraturan Daerah sesuai dengan Tupoksi.
- Merealisasikan dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang telah diuraikan diatas..

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP.) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ini kami buat, dengan harapan dapat memberikan gambaran kepada penentu kebijakan dan diharapkan saran/kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

**Ketala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Lombok Tengah**



H. MUHAMAD
NIP. 19651231/198903 209

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN LKJ-IP SKPD : LAMPIRAN LKJ-IP TERDIRI DARI

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
2. DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2021
3. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2021

| HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2021 | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| NO | SASARAN RPJMD | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021 | SASARAN RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD TAHUN 2021 | PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2021 | PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 | ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021 |
| 1 | Pelayanan umum pemerintah yang mudah, cepat dan bersih | Meningkatkan kualitas pelayanan investasi daerah | | Indeks Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Rp 4.485.714.024 |
| | | | Meningkatkan kapasitas layanan perijinan | Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan | Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan | Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja | Rp 28.182.431 |
| | | | | Indeks kepuasan masyarakat (poin) | Indeks kepuasan masyarakat (poin) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 3.466.078.994 |
| | pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas | Peningkatan Investasi | | Laju pertumbuhan investasi (%) | Laju pertumbuhan investasi (%) | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 162.454.156 |
| | | | Menciptakan iklim investasi favorabel | Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.) | Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.) | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 386.618.273 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 282.186.440 |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 160.193.730 |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Rp 202.962.164 |
| | | | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | Rp 38.731.363 |
| | | | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Rp 164.230.801 |
| | | | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp 129.117.555 |
| | | | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | Rp 129.117.555 |
| | | | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Rp 129.186.687 |
| | | | | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | Rp 129.186.687 |
| | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp 392.223.366 |
| | | | | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | Rp 392.223.366 |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Rp 44.048.728 |
| | | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah | Rp 44.048.728 |